



**IDENTIFIKASI PERMUKIMAN KUMUH PADA TINGKAT RW DAN  
ARAHAN PENANGANAN DI KELURAHAN TANJUNGSARI  
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains

**Oleh:**

**Adit Pratama Setya Nugraha**

**3211415019**

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN GEOGRAFI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2019**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Artikel dengan judul "*Identifikasi Perumahan Kumuh Pada Tingkat Rw Dan Arahan Penanganan Di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*" telah disetujui pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Juli 2019


Pembimbing Skripsi



Dr. Rahma Hayati, S.Si., M.Si.  
NIP. 197206241998032003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Geografi,

  
Dr. Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si.  
NIP. 19621019 198803 1 002

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari Kamis

Tanggal 8 Agustus 2019


Penguji I

  
Dr. Sutono, M.Si.  
NIP. 196312171988031002

Penguji II

  
Dr. Saptomo Patro, M.Si.  
NIP. 196209281999031002

Penguji III

  
Dr. Rahma Hayati S.Si., M.Si.  
NIP. 197206241998032003

Mengetahui,

  
Dr. Moh. Salehatal Mustofa, M.A.  
NIP. 196308021988031001

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

### PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 8 Agustus 2019

  
Adit Pratama Setya Nugraha  
NIM. 3211415019

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

iv

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat (HR.Ahmad,athThbrani).
- Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkahpun (Ir.Soekarno).

### PERSEMBAHAN

Tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk,

1. Almamater saya Universitas Negeri Semarang
2. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Bapak Sugiyarto dan Ibu Suryowati serta Adikku tercinta Ahmad Alvian Bagus Setyawan untuk segala kasih sayang, doa, dukungan, motivasi dan semangatnya tanpa henti.
3. Keluarga besar Suyono dan Suripan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
4. Mega Novia Arifiani untuk segala doa, waktu, dukungan dan motivasinya.

## SARI

**Pratama Setya Nugraha, Adit.** 2019. *Identifikasi Permukiman Kumuh Pada Tingkat RW Dan Arahana Penanganan Di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.* Skripsi. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Rahma Hayati, S.Si., M.Si.

**Kata Kunci: Identifikasi, Permukiman Kumuh, Tingkat RW, Arahana Penanganan**

Kelurahan Tanjungsari merupakan salah satu kelurahan yang teridentifikasi kumuh yang ada di Kabupaten Rembang. Faktor penyebab kekumuhan adalah sarana dan prasarana lingkungan seperti fasilitas persampahan, drainase, jalan lingkungan dan keteraturan bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengidentifikasi persebaran permukiman kumuh tingkat RW, (2) faktor penyebab permukiman kumuh di masing-masing RW, dan (3) arahan penanganan untuk RW yang teridentifikasi paling kumuh..

Penelitian ini merupakan penelitian survai dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Tanjungsari dengan sampel yang diambil secara *Purposive sampling* sebanyak 96 KK. Metode pengumpulan data menggunakan instrumen lapangan, kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi, digitasi dan interpretasi citra. Teknik analisis data menggunakan analisis pembobotan yang didasarkan atas permen PUPR No.14/PRT/M/2018 yang telah dimodifikasi dan analisis skoring.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) seluruh RW yang ada di Kelurahan Tanjungsari teridentifikasi kumuh ringan (2) faktor penyebab kekumuhan dikarenakan sarana dan prasarana yang belum tersedia (3) kekumuhan tertinggi dialami oleh RW 01 arahan penanganannya dengan mengadopsi teori Van Horen, yaitu penanganannya dibagi menjadi 5 tataran utama.

Simpulan, Kekumuhan yang terjadi di Kelurahan Tanjungsari dikategorikan kumuh ringan yang terjadi akibat minimnya sarana dan prasarana yang ada. Saran, dibutuhkan perhatian pemerintah yang lebih lagi untuk penanganan permukiman kumuh melalui beberapa program lain yang dapat mengentaskan kekumuhan selain program kotaku. Karena pada dasarnya program kotaku hanta berfokus pada pembenahan fisik tanpa ada pembenahan secara humanis agar tercipta budaya cinta akan lingkungan.

## ABSTRACT

*Keywords: Identification, Slums Area, RW Level, Handling Directions*

*Tanjungsari Village is one of the villages identified as slums in Rembang Regency. The causes of slum are environmental facilities and infrastructure such as waste facilities, drainage, environmental roads and regularity of buildings. The purpose of this study is to (1) identify the distribution of RW slum levels, (2) the causes of slums in each RW, and (3) the handling directions for the poorest identified RW.*

*This study is a survey research with a quantitative approach. The population in this study were households who live in Tanjungsari Village by took samples in Purposive sampling in number of 96 families. Methods of data collection that used were field instruments, questionnaires, interviews and documentation studies, digitization and image interpretation. The data analysis technique used weighting analysis based on PUPR No.14 / PRT / M / 2018 candy that has been modified and scoring analysis.*

*The results of this study show that, (1) all RWs in the Tanjungsari Village are identified as light slums (2) the causes of slum due to facilities and infrastructure that are not existence yet (3) the highest slums that experienced by RW 01 the handling directions by adopting Van Horen's theory, namely the handle divided into 5 main levels.*

*Conclusion of this study is the slums that occur in the Tanjungsari Village are categorized as mild slums which occur due to the minimum of facilities and infrastructure existence. Suggestions, the government's more attention is needed to deal with slum settlements through several other programs that can resolve the slums except my city program. Because my hanta city program basically focuses on physical improvement without humanist improvements to create a culture of environment caring.*



## PRAKATA

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kemudahan, sehingga skripsi yang berjudul “Identifikasi Permukiman Kumuh Tingkat RW Dan Arahan Penanganan Di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang” ini dapat diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Universitas Negeri Semarang. Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada.

1. Prof. Dr. Fatur Rokhman M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan pelaksanaan penelitian.
3. Dr. Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si., Ketua Jurusan Geografi yang telah memberikan arahan dan kemudahan administrasi dalam penyusunan skripsi.
4. Dr. Rahma Hayati, M.Si sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan sabar selama proses penelitian berlangsung hingga akhir penulisan skripsi.
5. Drs. Saptono Putro, M.Si dan Drs. Sriyono, M.Si sebagai Dosen Penguji yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Drs. Hariyanto, M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan.



7. Lurah Kelurahan Tanjungsari yang telah memberikan ijin dan kerjasama selama penelitian
8. Para warga di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang yang telah bersedia menjadi responden yang sangat membantu dalam penelitian ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Demikian besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memotivasi karya-karya berikutnya yang lebih baik. Semoga bermanfaat.

Semarang,

Penyusun

The logo of Universitas Negeri Semarang (UNNES) is a large, stylized yellow emblem with a central vertical element and symmetrical, flame-like or leaf-like shapes on either side. At the top center of the emblem is a small red and white flame-like symbol.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SARI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis .....	7
<b>1.5. Batasan Istilah .....</b>	<b>7</b>
1.5.1. Identifikasi .....	7
1.5.2. Permukiman .....	8
1.5.3. Parameter dan Kriteria Penilaian Kawasan Kumuh.....	8
1.5.4. Kawasan Permukiman Kumuh.....	12
1.5.5. Strategi .....	13
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR.....</b>	<b>14</b>

<b>2.1. Deskripsi Teoritis .....</b>	<b>14</b>
2.1.1. Permukiman .....	14
2.1.2. Persyaratan Permukiman.....	14
2.1.3. Permukiman Kumuh .....	15
2.1.4. Tipologi Permukiman Kumuh .....	19
2.1.5. Faktor Penyebab Permukiman Kumuh .....	20
2.1.6. Strategi Tentang Penanganan Permukiman Kumuh .....	21
<b>2.2. Kajian Penelitian Yang Relevan .....</b>	<b>33</b>
<b>2.3. Kerangka Berfikir Penelitian .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB 3 metode penelitian .....</b>	<b>59</b>
<b>3.1. Populasi Penelitian .....</b>	<b>59</b>
<b>3.2. Sampel dan Teknik Sampling .....</b>	<b>59</b>
<b>3.3. Variabel Penelitian .....</b>	<b>61</b>
<b>3.4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>63</b>
3.4.1. Alat dan Bahan.....	63
3.4.2. Teknik Pengumpulan Data.....	64
<b>3.5. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>67</b>
3.5.1. Analisis Pembobotan.....	67
3.5.2. Analisis Tingkat Kekumuhan.....	67
3.5.3. Analisis Skoring.....	81
<b>BAB 4 hasil dan pembahasan .....</b>	<b>86</b>
<b>4.1. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Tanjungsari.....</b>	<b>86</b>
4.1.1. Letak Geografis.....	86
4.1.2. Letak Astronomis .....	88
4.1.3. Topografi dan Kelerengan .....	88
4.1.4. Gambaran Kekumuhan .....	88
4.1.5. Kepadatan Permukiman .....	89
4.1.6. Kondisi Jalan dan Drainase.....	89
4.1.7. Kondisi Ketersediaan Air Minum .....	89
<b>4.2. Hasil Penelitian .....</b>	<b>90</b>

4.2.1. Identifikasi Tingkat Permukiman Kumuh di RW 01, RW 02, RW 03 dan RW 04 Kelurahan Tanjungasari .....	90
<b>4.3. Pembahasan .....</b>	<b>161</b>
4.3.1. Kategori Kekumuhan Setiap RW Di Kelurahan Tanjungasari .....	161
4.3.2. Faktor Penyebab Kondisi Kekumuhan Di Masing-Masing RW Di Kelurahan Tanjungasari .....	164
4.3.3. Arahan Penanganan Permukiman Kumuh Pada RW 01 Yang Mengalami Kekumuhan Paling Tinggi .....	180
<b>BAB 5 Simpulan dan Saran .....</b>	<b>184</b>
<b>5.1. Simpulan.....</b>	<b>184</b>
<b>5.2. Saran.....</b>	<b>186</b>
<b>daftar pustaka .....</b>	<b>187</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>191</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Basis data Kawasan Kumuh Tahun 2018 Berdasarkan SK Kabupaten Rembang No.050/0960/2014 .....	4
Tabel 2.1. Tabel hasil-hasil penelitian yang relevan .....	49
Tabel 3.1. Tabel variabel, Subvariabel dan sumber data.....	62
Tabel 3.2. Tabel Penilaian Kawasan Kumuh .....	82
Tabel 3.3. Tabel Hasil Penilaian Kawasan Kumuh.....	83
Tabel 4.1. Tabel Kerusakan Jalan RW 01 .....	99
Tabel 4.2. Tabel Kerusakan Jalan RW 02.....	116
Tabel 4.3. Tabel Kerusakan Jalan RW 03.....	132
Tabel 4.4. Tabel Kerusakan Jalan RW 04.....	148
Tabel 4.5. Hasil Penilaian Kekumuhan .....	158



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir .....	58
Gambar 4.1. Peta Administrasi Kelurahan Tanjungsari .....	87
Gambar 4.2. Minimnya Sempadan Bangunan Terhadap Jalan .....	93
Gambar 4.3. Peta Sebaran Permukiman .....	95
Gambar 4.4. Jarak Antar Bangunan RW 01 .....	96
Gambar 4.5. Gambar Peta Jaringan Jalan RW 01 .....	98
Gambar 4.6. Kondisi Kerusakan Jalan di RW 01 .....	100
Gambar 4.7. Peta Jaringan Drainase RW 01 .....	101
Gambar 4.8. Kondisi Konstruksi Drainase di RW 01 .....	102
Gambar 4.9. Peta RTRW RW 01 .....	109
Gambar 4.10. Lokasi Sempadan Bangunan Terhadap AS Jalan .....	112
Gambar 4.11. Peta Jaringan Jalan RW 02 .....	115
Gambar 4.12. Peta Jaringan Drainase RW 02 .....	118
Gambar 4.13. Gambar Kondisi Drainase RW 02 .....	119
Gambar 4.14. Peta RTRW RW 02 .....	125
Gambar 4.15. Lokasi Sempadan Bangunan Terhadap Jalan .....	127
Gambar 4.16. Kondisi Jarak Antar Bangunan .....	139
Gambar 4.17. Peta Jaringan Drainase RW 02 .....	132
Gambar 4.18. Peta Jaringan Drainase RW 03 .....	134
Gambar 4.19. Gambar Kondisi drainase RW 03 .....	135
Gambar 4.20. Gambar Kondisi TPS RW 03 .....	138
Gambar 4.21. Peta RTRW RW 03 .....	141
Gambar 4.22. Lokasi Sempadan Bangunan Terhadap AS Jalan .....	144
Gambar 4.23. Peta Jaringan Jalan RW 04 .....	147

Gambar 4.24. Peta Jaringan Drainase RW 04 .....	150
Gambar 4.25. Gambar Kondisi Konstruksi Drainase RW 04 .....	151
Gambar 4.26. Peta RTRW RW 04 .....	158
Gambar 4.27. Peta Klasifikasi Tingkat kekumuhan RW 04 .....	162



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Kuesioner .....	192
Lampiran 2	Lembar Penilaian Lingkungan .....	201
Lampiran 3	Lembar Penilaian Kawasan .....	207
Lampiran 4	Lembar Hasil Observasi .....	209
Lampiran 5	Surat Keputusan Buapti Rembang No.050/0960/2014 .....	241



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kepadatan penduduk. Letaknya yang strategis, Kabupaten Rembang merupakan pintu masuk Provinsi Jawa Tengah dari Jawa Timur, serta penghubung antara Provinsi Jawa Timur menuju Provinsi Jawa Barat, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di Kabupaten Rembang. Akibatnya terjadi peningkatan kebutuhan permukiman di Kabupaten Rembang.

Kebutuhan dan permintaan permukiman yang tinggi di Kabupaten Rembang tidak didukung oleh ketersediaan lahan. Masyarakat mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan mendirikan permukiman di daerah non permukiman seperti di pinggir sungai, pinggir rel kereta api, sekitar pantai, tambak dan lain lain. Permukiman tersebut akhirnya berkembang menjadi permukiman yang tidak layak huni atau biasa disebut dengan permukiman kumuh.

Keberadaan permukiman kumuh tidak selalu dikehendaki, namun keberadaannya dalam perkembangan wilayah tidak dapat dihindari. Pembangunan perumahan yang kurang terarah dan terencana, serta kurang memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan sampah dan drainase akan cenderung mengalami

degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian biasa disebut permukiman kumuh.

Kekumuhan tersebut dapat terjadi akibat ulah dari masyarakat itu sendiri, ini terkait dengan budaya kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya kehidupan sehari-hari yang dimaksud seperti membuang sampah di sembarang tempat, buang air limbah KM/WC tidak di tempat seharusnya tetapi di sungai, laut, saluran, kebun hingga di pekarangan rumah tinggal, menurut Ridlo (2001).

Pentingnya penanganan permasalahan lingkungan salah satunya adalah penanganan permukiman kumuh. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2010 tentang perumahan dan kawasan permukiman bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan kesejahteraan manusia, serta mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Kajian indikator lintang sektor yang diterbitkan oleh BPS, mengenai potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) di Indonesia. Tahun 2030 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan. Proporsi populasi penduduk yang tinggal di daerah kumuh yang menyerupai kemiskinan serta kondisi hidup yang tidak memadai. Urbanisasi yang cepat jika tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan permukiman kumuh, liar dan tidak layak. Oleh karena itu

dalam rangka mempertajam kebijakan tersebut perlu untuk mengidentifikasi dan menghitung daerah kumuh di perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2016: 173)

Berdasarkan data BPS selama kurun waktu tahun 2013 – 2015, rumah tangga yang menempati rumah layak huni mengalami peningkatan. Secara nasional, rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni mencapai 86,99 persen pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 92,80 persen pada tahun 2015. Peningkatan tersebut juga terjadi pada daerah perkotaan dan perdesaan. Hingga tahun 2015, rumah tangga daerah perdesaan yang menempati jumlah rumah layak huni lebih sedikit dibanding dengan daerah perkotaan. Hal ini tentunya diperlukan adanya upaya perbaikan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2016: 176)

Salah satu tempat di Kabupaten Rembang yang mengalami peningkatan jumlah penduduk adalah Kecamatan Rembang. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan dan permintaan permukiman semakin tinggi, tetapi ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Penduduk setempat mencari alternatif lain yaitu membangun rumah dengan memanfaatkan tanah yang ada tanpa melihat adanya akses jalan, saluran air dan sarana pembuangan sampah sehingga lokasi tersebut beresiko menjadi permukiman kumuh.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Rembang, jumlah penduduk Kecamatan Rembang mengalami peningkatan terutama pada Kelurahan Tanjungsari. Peningkatan jumlah penduduk yang fluktuatif. Berdasarkan data

BPS Kabupaten Rembang dari tahun 2014 s/d tahun 2017 jumlah penduduk Kelurahan Tanjungsari mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 mencapai 3.212 jiwa, pada tahun tahun 2015 terjadi penurunan jumlah penduduk menjadi hanya 3.200 jiwa, dan peningkatan jumlah penduduk paling signifikan terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk mencapai 3.235 jiwa. Tahun 2017 jumlah penduduk mencapai 3.254 jiwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan peningkatan berbagai macam aspek baik fisik dan non fisik maka akan meningkatkan kondisi permukiman menjadi semakin kumuh (Badan Pusat Statistik, 2014-2017: 17).

Berdasarkan SK Bupati Rembang No.050/0960/2014, basis data kawasan kumuh tahun 2018, Kelurahan Tanjungsari menempati peringkat pertama daerah kawasan kumuh dengan luas 17,929 hektar. Sehingga Kelurahan Tanjungsari layak mendapatkan penanganan guna mengatasi kekumuhan yang terjadi. Kelurahan Tanjungsari menjadi objek penelitian karena adanya permasalahan di beberapa parameter yang belum bisa dituntaskan penyebab kekumuhannya oleh pihak terkait. Data permukiman kumuh Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

**Tabel 1.1.** Basis data Kawasan Kumuh Tahun 2018 Berdasarkan SK Bupati Rembang No.050/0960/2014

No.	Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kel	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kab. Rembang	Tanjungsari	Kec. Rembang	17,929
2	Kab. Rembang	Pasarbanggi	Kec. Rembang	3,034
3	Kab. Rembang	Tritunggal	Kec. Rembang	5,425

4	Kab. Rembang	Padaran	Kec. Rembang	8,754
5	Kab. Rembang	Dorokandang	Kec. Lasem	1,978
6	Kab. Rembang	Ngemplak	Kec. Lasem	3,741
7	Kab. Rembang	Soditan	Kec. Lasem	8,511
8	Kab. Rembang	Babagan	Kec. Lasem	10,155
9	Kab. Rembang	Kragan	Kec. Kragan	6,100
10	Kab. Rembang	karangharjo	Kec. Kragan	9,500
11	Kab. Rembang	Tegalmulyo	Kec. Kragan	14,220
12	Kab. Rembang	Pamotan	Kec. Pamotan	7,210
13	Kab. Rembang	Bangunrejo	Kec. Pamotan	14,510
14	Kab. Rembang	Sidorejo	Kec. Pamotan	3,340

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum 2018

Melihat perkembangan perumahan dan permukiman di Kelurahan Tanjungsari yang semakin pesat, perlu adanya identifikasi kawasan-kawasan RW mana saja yang menjadi daerah kawasan kumuh. Sangat menarik bila dilakukan kajian bagaimana kondisi permukiman kumuh dan bagaimana strategi penanganannya. Sehingga peneliti mengangkat judul **“Identifikasi Permukiman Kumuh pada Tingkat RW dan Arah Penanganan di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat kekumuhan yang terjadi di masing-masing RW yang ada Kelurahan Tanjungsari?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan permukiman kumuh masing-masing RW di Kelurahan Tanjungsari?
3. Bagaimana arahan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungsari?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi persebaran permukiman kumuh tingkat RW di Kelurahan Tanjungsari.
2. Mengetahui faktor penyebab permukiman kumuh masing-masing RW di Kelurahan Tanjungsari.
3. Menentukan arahan penanganan RW prioritas permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungsari.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Sebagai pengembangan ilmu geografi dalam kajian yang berkaitan dengan analisis sebaran permukiman kumuh dan solusi penanganannya. Dapat mengetahui macam - macam faktor yang menjadi penyebab suatu permukiman menjadi kumuh. Serta dapat memberikan arahan mengenai pengelolaan kawasan kumuh.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Rembang dan pihak yang terkait. guna memberikan rekomendasi pengambilan kebijakan dalam membenahi daerah yang dikategorikan kumuh agar dapat segera ditangani.

## **1.5. Batasan Istilah**

Batasan istilah merupakan batasan dasar mengenai acuan dalam proses penelitian. Tujuannya yaitu agar dalam melaksanakan penelitian dengan pengertian yang sama dan berkaitan mengenai identifikasi permukiman tingkat RW di Kelurahan Tanjungsari serta diketahui mengenai parameter apa saja yang menyebabkan kekumuhan di tiap RW. Berikut merupakan batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

### **1.5.1. Identifikasi**

Identifikasi adalah proses pengenalan, menempatkan objek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu.

Identifikasi yang dilakukan pada penelitian ini difokuskan pada tingkat kekumuhan permukiman di tiap RW yang ada di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Rembang.

### **1.5.2. Permukiman**

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan Kelurahan. Permukiman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permukiman berdasarkan tingkat RW yang ada di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Rembang.

### **1.5.3. Parameter dan Kriteria Penilaian Kawasan Kumuh**

Untuk melakukan indentifikasi kawasan permukiman kumuh perlu digunakan kriteria dan parameter. Penentuan kriteria ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi sesuai RT RW, status tanah (kepemilikan) tanah, tingkat kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, kondisi fisik bangunan, fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal dll.

Untuk memantau daerah kumuh di seluruh dunia, UN-Habitat (2008) mengidentifikasi permukiman kumuh setidaknya menggunakan lima fasilitas: keamanan kepemilikan, akses air minum, akses ke



sanitasi, ruang yang memadai, dan daya tahan perumahan (petel, koizumu & crooks dalam Aguiar, 2018: 2)

Parameter dan kriteria penilaian kawasan kumuh merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan kekumuhan pada kajian yang difokuskan pada aspek kualitas fisik bangunan dan infrastruktur keciptakaryaan lokasi. Identifikasi permasalahan kekumuhan dilakukan berdasarkan pertimbangan pengertian permukiman kumuh, persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, serta standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan secara nasional berdasarkan beberapa kriteria (Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016).

Dari beberapa parameter tersebut sehingga diketahui skor dari masing-masing parameter. Nilai parameter itu kemudian diidentifikasi nilai dari masing-masing parameter mana saja yang dapat menyebabkan kekumuhan pada tingkat RW di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang. Kriteria-kriteria menurut buku pedoman identifikasi permukiman kumuh yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2006 yang dikelompokkan ke dalam:

1. Vitalitas Non Ekonomi.
2. Vitalitas Ekonomi Kawasan.
3. Status Kepemilikan Tanah.

4. Keadaan Prasarana dan Sarana.

5. Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota.

6. Prioritas Penanganan.

Secara umum apabila merujuk pada kriteria sarana dan prasarana yang digunakan antara lain (Permen PUPR RI No. 14/PRT/M/2018) tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh :

- 1) Kondisi bangunan dengan faktor kriteria sebagai berikut.
  - a. Ketidak teraturan bangunan.
  - b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.
  - c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- 2) Kondisi jalan lingkungan dengan faktor kriteria sebagai berikut.
  - a. Jalan lingkungan tidak melayani seluruh permukiman.
  - b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- 3) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum
  - a. Akses aman air minum tidak tersedia.
  - b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- 4) Kondisi drainase lingkungan dengan faktor kriteria sebagai berikut.
  - a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan.
  - b. Ketidaktersediaan drainase.
  - c. Tidak terhubungnya dengan sistem drainase perkotaan.

- d. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- 5) Kondisi pengelolaan air limbah dengan faktor kriteria sebagai berikut:
- a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
  - b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- 6) Kondisi pengelolaan persampahan dengan faktor kriteria sebagai berikut:
- a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
  - b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
  - c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
- 7) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup sebagai berikut :
- a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
  - b. Ketidaksiediaan sarana proteksi kebakaran.

Serta beberapa kriteria lain yakni status tanah yang meliputi kriteria status tanah dan status kepemilikan atas tanah, serta vitalitas non ekonomi seperti kesesuaian tata ruang, kondisi fisik bangunan dan kondisi kependudukan, dukungan masyarakat, komitmen pemerintah.

#### 1.5.4. Kawasan Permukiman Kumuh

Kawasan permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, kepadatan penduduk yang tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budihardjo,1997).

Menurut PBB, permukiman kumuh adalah tempat dimana orang memiliki status, kependudukannya tidak aman. Hal ini berarti bahwa permukiman adalah permukiman yang tidak memiliki legalitas hukum untuk rumah yang mereka tempati. Kumuh ditandai dengan kurangnya akses air bersih dan sanitasi, perumahan dibangun dengan buruk dan kepadatan penduduk yang tinggi (PBB dalam Nisbett,2017)

Kawasan yang menjadi kajian penelitian ini adalah seluruh RW yang ada di Kelurahan Tanjungsari yang terdiri dari 4 RW. Nantinya akan diklasifikasikan kedalam tiga kelas kekumuhan. kekumuhan yang tertinggi yang akan diberikan arahan penanganan.

### 1.5.5. Strategi

Strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (Planning) dan manajemen (Management) untuk mencapai tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana teknik operasionalnya. (Effendy dalam Nainggolan, 2015:10).

Menurut Rungkuti, pengertian strategi adalah alat untuk mencapai tujuan (Rungkuti dalam Nainggolan, 2015:10). Strategi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Perencanaan dan manajemen arahan penanganan kekumuhan guna penanganan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kekumuhan dan diharapkan dapat menghilangkan penyebab kekumuhan yang ada di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR**

#### **2.1. Deskripsi Teoritis**

##### **2.1.1. Permukiman**

Menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan Kelurahan.

Menurut Berlow dan Newton, 1971 :62 dalam Rindarjono, 2012 istilah permukiman atau *settlement* adalah semua tempat tinggal manusia baik gubug atau pondok tunggal beratap dedaunan, atau rumah – rumah di perladangan hingga permukiman yang sangat besar atau kota dengan ribuan bangunan atau ribuan tempat tinggal.

Konsep mengenai permukiman tersebut, pada penelitian ini konsep yang permukiman yang dimaksud yaitu bentukan buatan yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk bertempat tinggal secara sementara ataupun menetap. Di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang penunjang kehidupan penduduk yang tinggal di dalamnya.

##### **2.1.2. Persyaratan Permukiman**

Agar tercipta pembangunan permukiman yang sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak merusak lingkungan, maka dapat dirumuskan secara sederhana tentang ketentuan yang baik untuk suatu permukiman yaitu harus memenuhi sebagai berikut:

- a) Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik, yang umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara dan pencemaran lingkungan.
- b) Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lain-lain.
- c) Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan gangguan air walaupun hujan yang lebat sekalipun.
- d) Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah.
- e) Dilengkapi dengan fasilitas air kotor/ tinja yang dapat dibuat dengan sistem individual yakni tangki septik dan lapangan rembesan, ataupun tangki septik komunal.
- f) Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.
- g) Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, lapangan atau taman, tempat beribadah, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala besarnya permukiman itu.
- h) Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon (Sinulingga dalam Hutapea, 2012).

### **2.1.3. Permukiman Kumuh**

Biasanya permukiman kumuh ditandai dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, tinggi kepadatan hunian sangat tinggi,

tinggi kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas rumah sangat rendah tidak memadai kondisi sarana dan prasarana dasar seperti air bersih, jalan, sanitasi, listrik fasilitas pendidikan, ruang terbuka/rekreasi/ sosial, fasilitas pelayanan kesehatan, pembelajaran dan sebagainya. Hal ini juga ditambah dengan tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan yang rendah.

Kumuh mencakup berbagai masalah informal, permukiman ilegal, tidak adanya pelayanan infrastruktur dasar seperti perumahan, air dan sanitasi membuat hidup di permukiman menjadi tidak tertahankan ( Muchadenyika, 2018)

Menurut UU No. 1 pasal 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman menyatakan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dengan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Menurut Sinulingga dalam Hutapea, 2012) ciri-ciri kampung/permukiman kumuh terdiri atas:

- 1) Penduduk sangat padat antara 250-400 Jiwa/Ha. Pendapat para ahli perkotaan menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah mencapai 80 Jiwa/Ha maka akan timbul masalah kepadatan ini, antara perumahan yang dibangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan fisiologis, Psikologis dan perlindungan terhadap penyakit.



- 2) Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena sempitnya, kadang-kadang jalan ini sudah tersembunyi dibalik atap rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain.
- 3) Fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan malahan biasa terdapat jalan jalan tanpa drainase, sehingga apabila terjadi hujan deras kawasan ini akan sangat mudah tergenang oleh air.
- 4) Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Diantaranya yang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan rumah.
- 5) Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur dangkal, air hujan atau membeli secara galon.
- 6) Tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umumnya tidak permanen dan malahan banyak yang tidak layak.
- 7) Pemilikan hak atas lahan sering ilegal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa.

(Judohusodo, 1991 :64 dalam Rindarjono 2012), mendefinisikan permukiman kumuh dan fenomena kependudukan, yakni permukiman kumuh merupakan permukiman yang ditandai dengan rendahnya kualitas kehidupan. Seperti tingginya angka kepadatan penduduk, yaitu berkisar antara 350-1250 jiwa perhektar dengan ukuran luas kampung 15-120 hektar. Socky (1993), mendefinisikan permukiman kumuh

berdasarkan ciri fisiknya. Ciri-ciri bangunan dan lingkungan permukiman kumuh antara lain adalah:

- a) Tingginya tingkat kepadatan penduduk lebih dari 1.250 jiwa perhektar.
- b) Kepadatan bangunan juga cukup tinggi hingga mencapai 250 atau lebih rumah perhektarnya.
- c) Ukuran bangunan yang kecil-kecil antara 25 meter persegi bahkan kurang.
- d) Tata letak yang kurang tertaur.
- e) Sanitasi jelek serta kualitas bangunan yang jelek.

Clinord (dalam Rindarjono 2012: 64), mengindikasikan bahwa kekumuhan disebabkan oleh adanya pengaruh pertumbuhan penduduk terutama kepadatannya, sebagai akibat urbanisasi, kemiskinan, kebudayaan dan kemauan politik. Yunus (2000), melihat bahwa terbentuknya permukiman kumuh berasosiasi dengan “*areas of poverty degradation and crime*” karena adanya deterogenesis lingkungan permukiman. Dengan demikian, penurunan kualitas lingkungan permukiman juga sebagai penyebab munculnya daerah permukiman kumuh.

Kemiskinan, kepadatan tinggi, tidak adanya utilitas dan kurangnya infrastruktur adalah ciri umum dari daerah kumuh perkotaan (UN-Habitat, 2003; Islam, 1996a; Miah et al, 1998 dalam dalam Chowdhury, 2006). Masyarakat miskin perkotaan pada umumnya dan

penduduk daerah kumuh pada khususnya telah merasakan dampak negatif dari kurangnya layanan perkotaan. Lingkungan permukiman kumuh sangat tidak higienis karena lokasinya seperti tempat pembuangan limbah padat, saluran buangan terbuka dan selokan, dataran rendah, tanggul dan sering sepanjang jalur kereta api ( UN-Habitat, 2003; BBS, 1998; CUS, 1997 dalam Chowdhury 2006)

#### **2.1.4. Tipologi Permukiman Kumuh**

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh menurut Permen PUPR RI No. 14/PRT/M/2018 antara lain:

- 1) Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air.
- 2) Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air.
- 3) Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah.
- 4) Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perbukitan.
- 5) Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana.

Tipologi permukiman kumuh berdasarkan klasifikasi Dirjen Perumahan dan Permukiman (2002). Secara umum lingkungan permukiman kumuh dapat di klasifikasikan menjadi 7 yaitu :

- 1) Permukiman kumuh nelayan.
- 2) Permukiman kumuh dekat dengan pusat kota.

- 3) Permukiman kumuh pusat kota.
- 4) Permukiman kumuh pinggiran kota.
- 5) Permukiman kumuh daerah pasang surut.
- 6) Permukiman kumuh di daerah rawan bencana.
- 7) Permukiman kumuh di tepi sungai.

#### **2.1.5. Faktor Penyebab Permukiman Kumuh**

Permukiman kumuh terdiri dari berbagai macam aspek penting, meliputi tanah, perumahan, komunitas, sarana dan prasarana dasar, yang terajut dalam suatu ekosistem. Sehingga pada penanganan permukiman kumuh hendaknya harus dipandang secara menyeluruh dan utuh. Menurut Khomarudin, 1997 penyebab utama tumbuhnya permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

- a) Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
- b) Sulit mencari pekerjaan.
- c) Sulit mencil atau menyewa tanah.
- d) Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan.
- e) Perbaikan ingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah serta disiplin warga yang rendah.
- f) Semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah.

Babychen Mathew (dalam Rindarjono, 2012: 65), lebih memperjelas permukiman kumuh selalu berada di daerah miskin, penyebabnya adalah adanya jurang pemisah antar stratifikasi dalam

masyarakat, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan permainan politik yang tidak elegan dari politisi, serta adanya tekanan dari mafia untuk mencari keuntungan dari situasi kemiskinan yang ada.

#### **2.1.6. Strategi Tentang Penanganan Permukiman Kumuh**

Bentuk-bentuk penanganan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan ada beberapa bentuk antara lain :

##### *4.2.1.4. Pengertian perbaikan Permukiman*

Usaha yang dapat dilakukan oleh penghuni rumah terhadap rumahnya antara lain:

- a) Usaha memenuhi kebutuhan ketia penghuni merasakan kekurangan pada rumahnya. Bentuk tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan berupa pindah ataupun melakukan perubahan terhadap rumahnya dengan cara melakukan perubahan (renovasi). Jadi penghuni secara aktif melakukan perubahan terhadap keadaan rumahnya atau diistilahkan dengan *housing adjusment*, Moris (dalam Syam, 2017).
- b) Usaha penghuni sebagai tanggapan atas tekanan sebagai akibat sebagai kekurangan pada rumah, dengan melakukan perubahan pada dirinya tanpa merubah rumahnya. Dalam kondisi ini penghuni bersifat pasif atau istilahnya sebagai *housing adaption*.

##### *4.2.1.4. Peningkatan Kualitas Linnkgungan Permukiman*

Penataan kawasan kumuh merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, terutama golongan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah yang masih menempati lingkungan yang kurang atau tidak layak huni. Bentuk-bentuk pola penanganan fisik infrastruktur dan bentuk rekomendasi penanganan non fisik menurut pola perumahan kumuh dan permukiman kumuh menurut Permen PUPR RI No.14/PRT/M/2018 antara lain :

*i. Pola Penanganan Fisik*

1. Pemugaran

a) Bangunan Gedung

Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan masa bangunan kembali sesuai dnegan saat awal dibangun

b) Jalan Lingkungan

Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jallan saat awal dibangun, seperti perbaikan infrastruktur jalan.

c) Penyediaan air minum

Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan.

d) Drainase lingkungan

Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan kondisi semula.

e) Pengelolaan air limbah

Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun. Seperti komponen perpiaraan, tangki septik, spal dll.

f) Pengelolaan persampahan

Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan balikan kondisi sesuai dengan persyaratan semula.

g) Proteksi kebakaran

Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengemmbalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran

2. Peremajaan

a) Bangunan gedung

Perubahan fungsi dan masa bangunan dari kondisi awal saat dibangun. Peningkatan kapasitas tampungan dari bangunan gedung.

b) Jalan Lingkungan

Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan. Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti penambahan lajur dan pelebaran.

c) Penyediaan air minum

Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi. Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum.

d) Drainase lingkungan

Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas tandon.

e) Pengelolaan air limbah

Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan pada komponen SPAL-S. Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T.

f) Pengelolaan persampahan

Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan seperti penambahan komponen pewardahan, pengumpulan dan pengelolaan. Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah.

g) Proteksi kebakaran

Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran.

Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran.

3. Permukiman kembali

a) Bangunan gedung



Pembangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan dan rencana tata ruang dan sesuai dengan daya tampungnya.

b) Jalan Lingkungan

Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.

c) Penyediaan air minum

Penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum.

d) Drainase lingkungan

Pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase.

e) Pengelolaan air limbah

Pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor limbah.

f) Pengelolaan persampahan

Pengembangan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai dengan arahan rencana induk sektor pengelolaan persampahan.

g) Proteksi kebakaran

Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran.

*ii. Pola Penanganan Non Fisik*

1. Terkait bangunan lingkungan

- a) Penetapan regulasi terkait bangunan dan lingkungan
- b) Penertiban IMB
- c) Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan lingkungan

2. Terkait drainase lingkungan

- a) Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan
- b) Pembinaan penyediaan resapan kavling
- c) Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase

3. Terkait penyediaan air minum

- a) Penetapan regulasi terkait SPAM
- b) Pembinaan penyediaan air minum berbasis masyarakat
- c) Pembinaan mengurangi eksploitasi air tanah
- d) Pembinaan menggunakan air terpusat

4. Terkait pengelolaan air limbah

- a) Penetapan regulasi terkait sanitasi
- b) Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal, maupun terpusat
- c) Pembinaan pola sanitasi sehat
- d) Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat

5. Terkait pengelolaan persampahan

- a) Penetapan regulasi terkait persampahan

- b) Pembinaan program 3R
- c) Peningkatan pola hidup bersih
- d) Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat

6. Terkait potensi ekonnomi lokal

- a) Peningkatan potensi ekonomi lokal
- b) Program bina usaha dalam rangka pemberdayaa ekonomi masyarakat
- c) Bantuan modal usaha

7. Terkait status lahan

- a) Sosialisasi pada lokasi permukiman squotters
- b) Pembinaan sertifikasi kepemilikan lahan
- c) Pemberian izin pemanfaatn pada aset pemerintah/pemuda

8. Terkait partisipasi penanganan

- a) Sosialisasi perogram dan rencana penanganan lokasi
- b) Pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanganan
- c) Pembinaan kewaspadaan masyarakat

9. Terkait permukiman kembali

- a) Pembinaan program permukiman sementara dan permukiman kembai
- b) Pembinaan mengenai pola hidup vertical

10. Terkait pengelolaan

- a) Fasilitas pembentukan lembaga swadaya masyarakat
- b) Pembinaan upaya pemeliharaan dan perbaikan

c) Program penghargaan dan kompensasi.

Strategi lain yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan permukiman kumuh yakni dengan 3 metode, yaitu pembinaan, pelatihan dan pendampingan. Pertama, pembinaan melalui diskusi tentang dampak negatif permukiman kumuh terhadap kualitas permukiman dan kualitas kehidupan dan penghidupann masyarakat. Kedua pelatihan tentang strategi penataan permukiman kumuh skala mikro yang secara langsung meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal dan sekaligus meningkatkan kesadaran mandiri menjaga kebersihan serta keteraturan sarana dan prasarana rumah tempat tinggal mereka. Ketiga, pendampingan dalam menata permukiman skala mikro secara bertahap dengan pendekatan *community based development*.

Menurut Masrul (2008) menyebutkan bahwa pusat penelitian dan pengembangan kawasan permukiman dengan kriteria pokok sebagai berikut :

- a. Perlu keselarasan pembangunan untuk kepentingan pribadi dan umum.
- b. Perlu memperhatikan tata air, budaya lokal, serta kepentingan umum.
- c. Pengembangan kawasan permukiman dapat dibedakan atas kawasan permukiman penduduk asli dan kawasan permukiman baru.

- d. Pola permukiman atau erumahan nelayan harus dilakukan upaya penataan dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kawasan
- e. Program pemanfaatan kawasan yang dapat diterapkan untuk suatu kawasan permukiman penduduk asli (lama) antara lain melalui revitalisasi bangunan, penyediaan utilitas, penanganan sarana air bersih, limbah dan persampahan penyediaan dermaga, perahu, serta pemeliharaan drainase.
- f. Program pemanfaatan kawasan yang dapat diterapkan untuk kawasan permukiman baru antara lain melalui penatan bangunan dengan memberi ruang untuk *public acces* ke badan air, pengaturan pengambilan air tanah, relamasi, pengaturan batas sempadan dari badan air, dan program penghijauan sempadan.
- g. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Menurut Prahasta (dalam Mawardani, 2014) SIG adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis objek-objek dan fenomena dimana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis.

Demikian, SIG merupakan sistem komputer yang memiliki 4 kemampuan dalam menangani data yang bereferensi geografis, antara lain: (1) masukan, (2) manajemen data (penyimpanan dan

pemanggilan data), (3) analisis dan manipulasi data dan (4) keluaran.

Berdasarkan definisi di atas, SIG dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem yang dapat diuraikan sebagai berikut (Prahasta, 2009: 118, dalam Mawardani, 2010):

1) *Data Input*

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan dan menyimpan data spasial beserta atributnya dari berbagai sumber. Sub-sistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversikan atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format (*native*) yang dapat digunakan oleh perangkat SIG yang bersangkutan.

2) *Data Output*

Subsistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran (termasuk mengekspornya ke format yang dikehendaki) seluruh atau sebagian basis data (spasial), baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy* seperti halnya tabel, grafik, report, peta dan lain sebagainya.

3) *Data Management*

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem

basis data sedemikian rupa hingga mudah dipanggil kembali atau *retrieve* (*diload* ke memori), *diupdate* dan *diedit*.

#### 4) Data *manipulation* dan analisis

Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi (evaluasi dan penggunaan fungsi-fungsi dan operator matematis & logika) dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.

##### i. Kemampuan SIG

Salah satu kemampuan SIG adalah kemampuan analisis yang dapat dilakukannya. Secara umum terdapat dua jenis kemampuan analisis SIG, yaitu analisis spasial dan analisis atribut (basis data atribut).

##### 1) Kemampuan analisis spasial

##### a) Klasifikasi

Fungsi ini mengklasifikasikan kembali suatu data spasial atau atribut menjadi data spasial yang baru dengan menggunakan kriteria tertentu.

##### b) Jaringan (*Network*)

Fungsi ini merujuk data spasial titik-titik (*point*) atau garis-garis (*line*) sebagai suatu jaringan yang tidak terpisahkan.

##### c) *Overlay*

Fungsi ini menghasilkan data spasial baru dari minimal dua data spasial yang menjadi masukannya.

d) *Buffering*

Fungsi ini akan menghasilkan data spasial baru yang berbentuk *polygon* atau *zone* dengan jarak tertentu dari data spasial yang menjadi masukannya.

e) *3D analysis*

Fungsi ini terdiri dari sub-sub fungsi yang berhubungan dengan presentasi data spasial dalam ruang 3 dimensi. Fungsi analisis spasial ini banyak menggunakan fungsi interpolasi.

f) *Digital image processing* (pengolahan citra digital)

Fungsi ini dimiliki oleh perangkat SIG yang berbasis raster. Peran sig dalam penelitian ini adalah menyajikan data yang telah diperoleh menjadi bentuk peta. Peta yang dihasilkan merupakan hasil dari tumpang susun data peta berdasarkan parameter yang digunakan dalam penelitian ini. Peran lain dari sig dalam penelitian ini adalah melakukan interpretasi visual dengan menggunakan citra quickbird yang memiliki resolusi tinggi. Hasil pengolahan citra akan menghasilkan data berupa beberapa parameter yang dibutuhkan pada penelitian ini. Setelah diketahui nilai dari berbagai macam parameter yang dibutuhkan selanjutnya akan dilakukan overlay



sehingga dihasilkan peta untuk dilakukan analisis terhadap hasil persebaran permukiman kumuh.

## 2) Kemampuan analisis atribut

Analisis atribut terdiri dari operasi dasar sistem pengelolaan basisdata (*Data Base Management System*) dan perluasannya. Operasi dasar basis data mencakup: membuat basisdata baru, menghapus basisdata, membuat tabel basisdata, mengisi dan menyisipkan data, membaca dan mencari data, mengedit data yang terdapat di dalam tabel basisdata dan membuat indeks untuk setiap tabel basisdata.

Pada penelitian ini pada peta akan diisikan berbagai macam nilai atau harkat untuk masing- masing parameter yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat diketahui kelas dari tingkat kekumuhan tiap RW yang ada di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang.

## 2.2. Kajian Penelitian Yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai rujukan penelitian ini mengambil dua sumber yaitu dari skripsi dan jurnal. Berdasarkan skripsi dengan judul “Kajian Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh Kota” yang disusun oleh Raisya Nursyahbani dan Bitta Pigawati tahun 2015. ini memiliki masalah munculnya kampung kumuh yang ada di kota semarang. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan meningkatnya

kebutuhan penduduk yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan ruang permukiman di Kampung Gendekan.

Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui karakteristik kawasan permukiman kumuh di kampong kota (Kampung Gendekan). Hasil penelitian dibagi menjadi lima yaitu: (1) Karakteristik penghuninya merupakan warga campuran antara etnis tionghwa dan etnis pribumi dengan tingkat ekonomi, pendidikan dan huniannya masih rendah, (2) Karakteristik sarana dan prasarananya masih rendah terutama pada kebutuhan privat, (3) Karakteristik lingkungan masih rendah karena minimnya ruang terbuka hijau, (4) Hasil analisis tingkat kekumuhannya, kampung gendekan dibagi menjadi dua tipologi yakni kumuh sedang dan kumuh rendah.

Sumber yang kedua berasal dari jurnal dengan judul “Identifikasi Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat RT di Kelurahan Keputih Kota Surabaya” yang disusun oleh Crysta Elpidia Agatha dan Yanto Budisanto 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan permukiman kumuh dan menganalisis parameter-parameter penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Keputih. Masalah yang diambil peneliti dikarenakan Pada Kelurahan Keputih berdasarkan data DLH Kota Surabaya tahun 2008, pada Kelurahan Keputih terdapat dua titik sebaran permukiman kumuh tepatnya di daerah Keputih Timur dan Keputih Tegal Metode penelitian yang digunakan dengan metode: (1) Pengambilan data menggunakan citra beresolusi tinggi Plaides 1A, kemudian dilakukan

analisis overlay, untuk membuat peta kerja penelitian (2) Analisis penyebab permukiman kumuh dilakukan dengan cara skoring dari hasil setiap parameter pada setiap lokasi untuk mengetahui parameter kekumuhan tiap RT. Hasil penelitian Kondisi proteksi kebakaran dan kondisi penyediaan air minum merupakan parameter penyebab dengan lokasi permukiman kumuh terbanyak dikarenakan semua lokasi di Kelurahan Keputih belum memiliki pengamanan kebakaran dan tujuh lokasi RT belum memiliki perpipaan yang dapat digunakan untuk air minum dengan kapasitas yang mencukupi.

Sumber yang ketiga berasal dari jurnal dengan judul “Identifikasi Penentuan Prioritas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Menggunakan Metode AHP ( *Analytical Hierarchy Process*)” yang disusun oleh Imy Hafsah Fatihul dan Yanto Budi Susanto tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi penentuan prioritas kriteria kawasan permukiman kumuh perkotaan menggunakan metode AHP ( *Analytical Hierarchy Process*). Masalah yang diambil peneliti dikarenakan dikeluarkannya UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman maka perlu dilakukan adanya identifikasi wilayah kumuh oleh karenanya diperlukan pembuatan peta lokasi kawasan kumuh perkotaan.

Metode penelitian yang digunakan dengan metode: (1) Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap stakeholder dan studi literatur. (2) Metode analisis dengan pembobotan prioritas kriteria kriteria yang berpengaruh terhadap kawasan permukiman kumuh di wilayah penelitian. Hasil penelitian ini adalah diketahuinya kriteria yang sangat

berpengaruh terhadap penentuan identifikasi kawasan kumuh di wilayah penelitian yaitu kriteria sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis, tidak terpeliharaya sarana dan prasarana persampahan, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, cakupan pelayanan jalan lingkungan dan ketidak tersediaan drainase.

Sumber yang keempat berasal dari jurnal dengan judul “Identifikasi Permukiman Kumuh di Pusat Kota Jambi” yang disusun oleh May Istikasari dan Parfi Khadiyanto tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui daerah mana saja yang menjadi kawasan permukiman kumuh di pusat kota jambi. Masalah yang diambil peneliti adalah Kecamatan pasar Jambi memiliki permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya bangunan semi permanen yang tinggi, masalah legalitas lahan, serta prasarana jalan, drainase, persampahan dan limbah yang buruk.

Metode penelitian yang digunakan dengan metode: (1) Penelitian yang dilakukan ini merupakan metode penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan perhitungan melalui pembobotan berdasarkan hasil kuesioner dan observasi yang didapatkan dilapangan, (2) Teknik analisis kuantitatif, (3) Teknik analisis visual. Hasil penelitian ini berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan sungai asam dan Kelurahan beringin dengan tingkat kekumuhan sedang, dan Kelurahan Orang Kayo Hitam dengan tingkat kekumuhan tinggi. Permukiman kumuh tercipta karena daerah tersebut setiap musim hujan sering tergenang banjir karena buruknya kualitas bangunan, jarak bangunan yang sangat rapat, serta kondisi jalan

lingkungan, kondisi drainase, kondisi air minum, kondisi air limbah dan kondisi persampahan yang buruk.

Sumber yang kelima berasal dari jurnal dengan judul “Identifikasi Kawasan Kumuh dan Strategi Penangannya pada Permukiman di Kelurahan Rengas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene” yang disusun oleh Muhajir Syam tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk (1) Mengetahui tingkat kekumuhan permukiman di Kelurahan Rengas, Kecamatan Banggae, (2) Mengetahui strategi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Rengas, Kecamatan Banggae. mengetahui daerah mana saja yang menjadi kawasan permukiman kumuh di pusat kota jambi. Masalah yang diambil peneliti adalah Kelurahan Rengas, Kecamatan Banggae, merupakan salah satu titik kawasan permukiman kumuh yang berada di kabupaten majene. Sudah terbentuk lama akan tetapi kurang adanya perhatian dan penanganan oleh pemerintah setempat.

Metode penelitian yang digunakan dengan metode analisis pembobotan dan analisis SWOT. Hasil penelitian tingkat kekumuhan wilayah studi adalah kumuh sedang, penyebab utama kekumuhan adalah kondisi drainase yang rusak. Serta ketidak tersediaan jalan akses untuk mobil damkar. Konsep penataan yang diterapkan pada wilayah studi adalah peremajaan baik penataan fisik maupun non fisik.

	Nama/Judul			Metode	Hasil
	Raisya Nursyahbani dan Bitta Pigawati (2015) / Jurnal Teknik PWK “Kajian Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Lampung Kota”.	1.Masalah munculnya kampung kumuh yang ada di kota semarang. 2.Pesatnya pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan ruang bermukim di kampung Gendekan.	1. Untuk mengetahui karakteristik kawasan permukiman kumuh dikampung kota (Kampung Gendekan)	1. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif (skoring) 2. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik survei lapangan.	1. Karakteristik penghuninya merupakan warga campuran antara etnis tionghwa dan etnis lokal dengan tingkat ekonomi, pendidikan, dan hunianya masih sangat rendah. 2. Karakteristik sarana dan prasarannya masih rendah terutama kebutuhan privat. 3. Karakteristik lingkungan masih rendah dengan minimnya ruang terbuka hijau. 4. Hasil dari analisis tingkat kekumuhannya, kampung gendekan dibagi menjadi dua jenis topologi yakni tingkat kumuh sedang dan kumuh rendah.
	Crysta Elpidia Agatha dan Yanto Budisanto ( 2017) / Jurnal Teknik ITS vol.6 ,No2 ( 2017)” Identifikasi Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat RT di Kelurahan Keputih Kota Surabaya”	1. Pada Kelurahan Keputih berdasarkan data DLH Kota Surabaya tahun 2008 . di Kelurahan Keputih terdapat dua titik sebaran permukiman kumuh tepatnya di daerah Keputih Timur dan Keputih Tegal.	1. Untuk mengidentifikasi dan memetakan permukiman kumuh dan menganalisis parameter-parameter penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Keputih.	1. Pengambilan data menggunakan citra beresolusi tinggi Plaides 1A, kemudian dilakukan analisis <i>overlay</i> , untuk membuat peta kerja penelitian 2. Analisis penyebab permukiman kumuh dilakukan dengan cara skoring dari hasil setiap parameter pada setiap lokasi untuk mengetahui parameter kekumuhan tiap RT.	1. Kondisi proteksi kebakaran dan kondisi penyediaan air minim merupakan parameter penyebab dengan lokasi permukiman kumuh terbanyak dikarenakan semua lokasi di Kelurahan Keputih belum memiliki pengamanan kebakaran dan tujuh lokasi RT belum memiliki perpipaan yang dapat digunakan untuk air

					minum dengan kapasitas yang mencukupi.
1. Ilmy Hafsah Fatihul dan yanto Budi Susanto (2017) Jurnal Teknik ITS vol 6 No 1” Identifikasi Penentuan Prioritas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Menggunakan Metode AHP( <i>Analitical Hierarchy Process</i> )	1. Dikeluarkannya UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman maka perlu dilakukan adanya identifikasi wilayah kumuh oleh karenanya diperlukan pembuatan peta lokasi kawasan kumuh perkotaan.	1. Untuk mengidentifikasi penentuan prioritas kriteria kawasan permukiman kumuh perkotaan menggunakan metode AHP ( <i>Analitical Hierarchy Process</i> )	1. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap stakeholder dan studi literatur. 2. Metode analisis dengan pembobotan prioritas kriteria kriteria yang berpengaruh terhadap kawasan permukiman kumuh di wilayah penelitian	1. Kriteria yang sangat berpengaruh terhadap penentuan identifikasi kawasan kumuh di wilayah penelitian yaitu kriteria sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis, tidak terpeliharaya sarana dan prasarana persampahan, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, cakupan pelayanan jalan lingkungan dan ketidakterediaan drainase.	
May Istikasari dan Parfi Khadiyanto (2014) / Jurnal Ruang Volumen 2 Nomor 4 “Identifikasi Permukiman Kumuh di Pusat Kota jambi”.	1. Kecamatan pasar Jambi memiliki permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya bangunan semi permanen yang tinggi, masalah legalitas lahan, serta prasarana jalan, drainase, persampahan dan limbah yang buruk. 2. Keberadaan permukiman kumuh di kecamatan pasar jamb, sehingga keberadaan permukiman kumuh	1. Untuk mengetahui daerah mana saja yang menjadi kawasan permukiman kumuh di pusat kota jambi.	1. Penelitian yang dilakukan ini merupakan metode penelitian kuantitatif. Dengan mengunaan perhitungan melalui pembobotan berdasarkan hasil kuesioner dan observasi yang didapatkan dilapangan 2. Teknik analisis kuantitatif 3. Teknik analisis visual	1. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan sungai asam dan Kelurahan beringin dnegan tingkat kekumuhan sedang, dan Kelurahan orang kayo hitam dengan tingkat kekumuhan tinggi. 2. Permukiman kumuh tercipta karena daerah tersebut setiap musim hujan sering tergenang banjir karena buruknya kualitas bangunan, jarak bangunan yang sangat rapat, serta kondisi jalan lingkungan , kondisi drainase, kondisi air minum, kondisi air limbah dan kondisi persampahan yang buruk.	

		dapat menjadi masalah bagi perkembangan kota jambi.			
Muhajir Syam (2017) Identifikasi Kawasan Kumuh dan Strategi Penangannya pada Permukiman di Kelurahan Rengas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (2017) Skripsi	Kelurahan Rengas, Kecamatan Banggae, merupakan salah satu titik kawasan permukiman kumuh yang berada di kabupaten majene. Sudah terbentuk lama akan tetapi kurang adanya perhatian dan penanganan oleh pemerintah setempat.	1. mengetahui tingkat kekumuhan permukiman di Kelurahan Rengas, Kecamatan banggae. 2. Mengetahui strategi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Rengas, Kecamatan Banggae.	1. Analisis Pembobotan 2. Analisis SWOT	1. Tingkat kekumuhan wilayah studi adalah kumuh sedang, penyebab utama kekumuhan adalah kondisi drainase yang rusak. Serta ketidak tersediaan jalan akses untuk mobil damkar. 2. Konsep penataan yang diterapkan pada wilayah studi adalah peremajaan baik penataan fisik maupun non fisik	



Penelitian di atas secara garis besar memiliki kesamaan. Kelima topik kajian pustaka di atas berteman mengenai analisis identifikasi permukiman kumuh. Tujuan untuk mengetahui tingkat kekumuhan dari masing masing lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan berupa survey lapangan dan analisis skoring. Hasil dari kedua penelitian memberikan gambaran mengenai tingkat kekumuhan satu lokasi dengan lokasi lain yang masih dalam satu area objek penelitian.

Perbedaan dari beberapa kelima penelitian yang relevan memiliki beberapa perbedaan. Masalah dari penelitian satu untuk mengetahui karakteristik kekumuhan sedangkan pada penelitian dua hanya berfokus pada faktor penyebab kekumuhan. Metode dari penelitian satu menggunakan analisis kuantitatif dan survey lapangan, sedangkan di penelitian dua menggunakan analisis kuantitatif dan pendekatan visual. Metode pada penelitian dua menggunakan analisis skoring dan analisis citra beresolusi tinggi untuk menentukan daerah kumuh. Metode penelitian pada jurnal tiga menggunakan teknik AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dengan cara memperoleh data melalui pembobotan pada kriteria yang berpengaruh terhadap kawasan kumuh di wilayah penelitian. Metode penelitian pada jurnal kelima menggunakan analisis SWOT.

### 2.3. Kerangka Berfikir Penelitian

Kerangka pemikiran bertujuan untuk menjelaskan sistematik alur pemikiran peneliti terkait dengan topik identifikasi permukiman kumuh berdasarkan tingkat RW dan strategi penanganan di Kelurahan Tanjungsari kecamatan timur

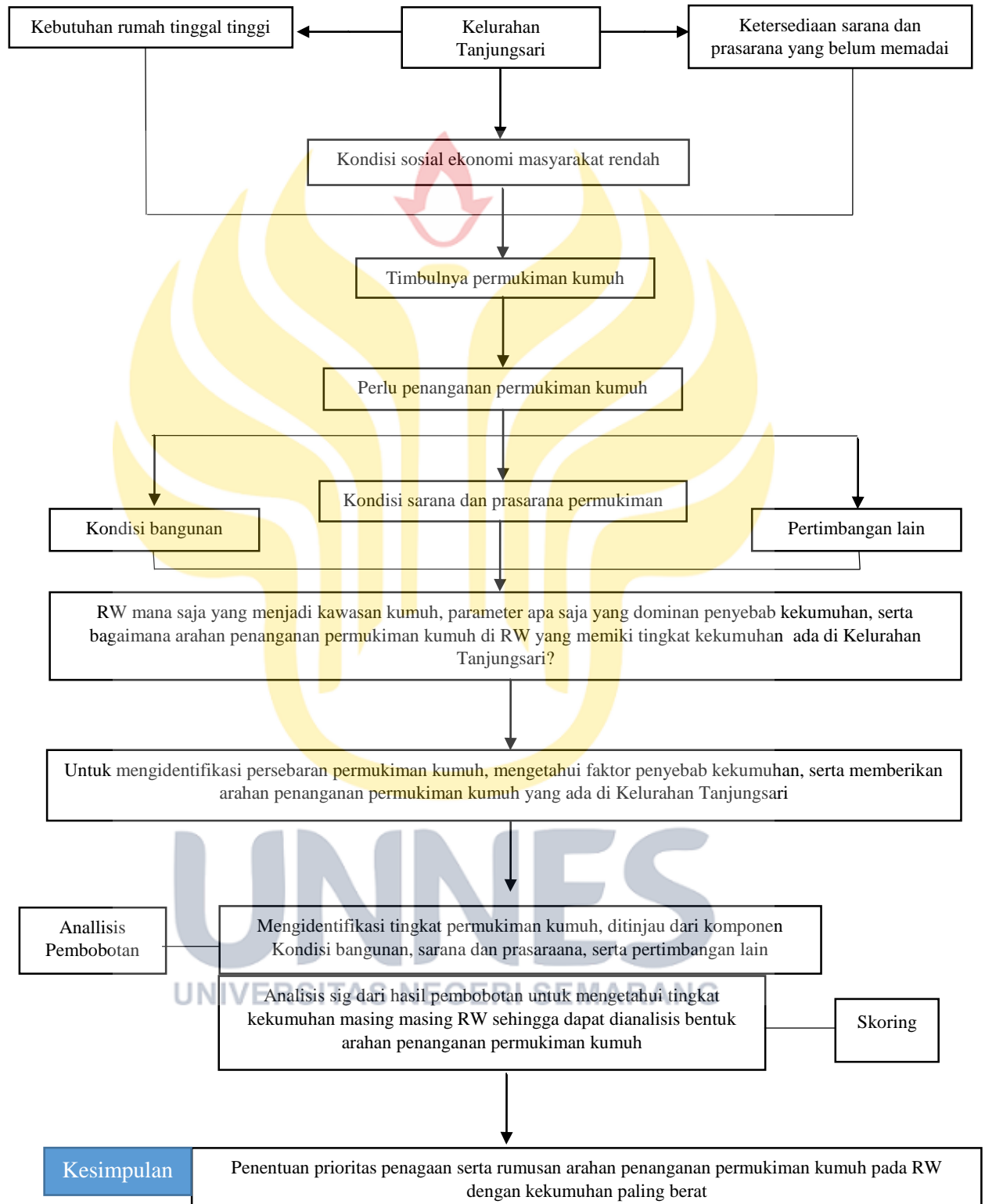
Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar. Permasalahan baru pun muncul yakni semakin bertambahnya kebutuhan akan permukiman. Apabila pembangunan permukiman tidak diawasi dan di pandu oleh pemerintah maka akan sangat memungkinkan timbulnya permukiman kumuh. dikarenakan minimnya fasilitas, sarana dan prasarana yang ada. Serta diperparah dengan kondisi sosial, ekonomi, serta pendidikan yang rendah di masyarakat.

Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai identifikasi kawasan kumuh di Kelurahan Tanjungsari agar dapat mengetahui tingkat kekumuhan masing-masing kawasan RW. Analisis yang digunakan dalam penelitian identifikasi kawasan kumuh Kelurahan Tanjungsari antara lain analisis analisis fungsi dan kependudukan kawasan perencanaan, analisis fisik dasar kawasan, analisis kondisi sarana dan prasarana dan analisis identifikasi kawasan kumuh. Supaya mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu suatu kajian atau gambaran seberapa besar tingkat kekumuhan yang ada di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang.

Penelitian ini diawali dari kondisi peningkatan jumlah penduduk yang terus terjadi di Kelurahan Tanjungsari. Sehingga menyebabkan munculnya permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungsari. Kemudian muncul pertanyaan faktor apa saja yang kira kira menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh tersebut. Sehingga perlu adanya penanganan kekumuhan yang terjadi di Kelurahan Tanjungsari yang dikaji dengan menganalisis 3 indikator utama yaitu kondisi bangunan, kondisi sarana dan prasarana permukiman dan pertimbangan lain. Sehingga nantinya dapat diketahui diketahui klasifikasi kekumuhan pada tiap RW. Kemudian dianalisis terkait faktor penyebab kekumuhan.

Setelah diketahui faktor penyebab permukiman kumuh tersebut kemudian akan dikelaskan tingkat kekumuhan di tiap RW di Kelurahan Tanjungsari, apakah tergolong kumuh ringan, sedang, berat. serta faktor yang menyebabkan kekumuhan tersebut yang diketahui dari hasil skor parameter yang memiliki skor 3, kenapa yang diambil adalah skor 3 karena , parameter yang memiliki skor 3 diatas 50% sarana dan prasarana yang tersedia. Hasil akhir dari penelitian ini adalah prioritas dan arahan penanganan permukiman kumuh tingkat RW yang ada di Kelurahan Tanjungsari yang memiliki tingkat kekumuhan paling berat atau memiliki nilai kekumuhan paling tinggi yang ada di Kelurahan Tanjungsari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka berfikir penelitian



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil skoring diketahui bahwa tingkat kekumuhan yang ada pada semua RW yang ada di Kelurahan Tanjungsari dikategorikan kumuh ringan. kekumuhan yang tertinggi terdapat pada RW 01, kekumuhan tertinggi kedua ada di RW 04, kekumuhan tertinggi ke tiga ada di RW 02 dan kekumuhan terendah ada di RW 02. Kondisi pertimbangan lain untuk semua RW dikategorikan rendah, serta legalitas tanah legal dan permukiman sudah sesuai dengan RTRW yang berlaku di Kabupaten Rembang.
2. Kondisi kekumuhan dari masing masing RW disebabkan oleh faktor-faktor yang hampir sama. Kekumuhan RW 01 disebabkan oleh keteraturan bangunan, jarak antar bangunan, persyaratan teknis pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan persampahan. Kondisi kekumuhan pada RW 02, tidak jauh berbeda dengan kondisi penyebab kekumuhan yang terjadi pada RW 01. Faktor penyebab kekumuhan yang terjadi dikarenakan beberapa faktor yakni ketidak teraturan bangunan. Ketersediaan air minum yang yang kurang dari segi

kualitasnya walaupun dalam segi kuantitas sudah mencukupi. Kondisi kekumuhan RW 02 terakhir adalah persyaratan teknis pengelolaan persampahan. Kekumuhan yang terjadi pada RW 03 diakibatkan oleh beberapa faktor dominan yang menyebabkan kekumuhan adalah keteraturan bangunan masih menjadi problem bagi kekumuhan yang ada di RW 03. Jarak antar bangunan dan akses air minum yang berkualitas bagus masih minim. kondisi pengelolaan persampahan dan ketersediaan jalan lingkungan. Kondisi kekumuhan RW 04 masih sama dengan RW lain yaitu ketidakteraturan bangunan, ketersediaan air minum, jarak antar bangunan, persyaratan teknis pengelolaan persampahan.

3. Berdasarkan nilai kekumuhan yang telah diketahui dari hasil penelitian RW yang membutuhkan penanganan adalah RW 01. Arahan penanganan dibagi menjadi 5 tataran. Tataran pertama adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan baik yang belum dibangun, maupun yang dalam kondisi rusak. Tataran kedua dengan melakukan perbaikan terhadap 3 aspek tripadya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas penduduk. Tataran ketiga dengan cara mengintegrasikan perspektif penataan wilayah kumuh dengan perspektif kota. Tataran keempat adalah desentraliasi kelembagaan. Terakhir tataran kelima adalah membangun *polytical will*.

## 5.2. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. Masyarakat perlu meningkatkan kembali dalam perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada, selain itu dibutuhkan pula peningkatan hasil perhatian dari pemerintah baik untuk meningkatkan pemeliharaan sejumlah drainase yang masih berfungsi dengan lebih baik sekaligus melakukan perbaikan untuk fasilitas sarana dan prasarana dasar yang mengalami kerusakan dari ringan hingga berat. Hingga membangun kembali fasilitas saranda dan prasarana yang belum dibangun yang belum tersedia di Kelurahan Tanjungsari.
2. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan akses yang sesuai dengan standar yang ditentukan untuk pencegahan dan penanganan kekumuhan yang terjadi di Kelurahan Tanjungsari. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kebakaran. Penyediaan alat pemadam kebakaran skala kecil yang dapat melalui menjangkau jalan-jalan yang sempit, melihat kondisi Kelurahan Tanjungsari yang merupakan permukiman padat, dimana jalan lingkunganya sangat sempit dan tidak bisa diakses mobil damkar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2015. Pemetaan SIG Untuk Mitigasi Bencana. Jakarta: Wahana Komputer.
- Agatha,Elphidia dan Yanto Budisusanto.2017. *Identifikasi Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat RT Di Kelurahan Keputih Kota Surabaya*. Surabaya: Jurnal Teknik ITS Vol.6,No 2.
- BPS.2018.Kecamatan Rembang Dalam Angka Tahun 2018. Dalam <https://semarangkab.bps.go.id>. Download 12 Desember 2018 Jam 15.00 WIB.
- Christiawan, Putu Indra dkk.2016.*Penataan Permukiman Kumuh Masyarakat Pesisir di Kelurahan Sangsit*. Bali:Vol,5 No2.(hal.52-58)
- Crysta,Elpidia Agatha.2017.Analisis Tingkat Kekumuhan dan Pola Penanganannya ( Studi Kasus : Kelurahan Kaliputih, Surabaya). *Tugas Akhir*.Departemen Teknik Geomatika ITS Sueabaya.
- Chowdy, Farhat Jahan dan A.T.M Nurull Amin.2006. Enviromentak Assesment In Slum Improvent Programs: Some Evidence A Studi On Infrastructure Project In Two Dhaka Slums. Thailand:Enviromental Impact Assesment Review 26 (hal530-552)
- Istikasari,May dan Parfi khadmiyanto.2014. *Identifikasi Permukiman Kumuh Di Pusat Kota Jambi*. Semarang: Jurnal Ruang Vol.2,No 4.
- IImy,Hafisah Faithul dan Yanto Budisusanto. 2017. *Identifikasi Penentuan Prioritas Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Menggunakan*



- Metode HHP ( Ananlitycal Hierarchy Process)*. Surabaya: Jurnal Teknik ITS  
Vol.6,No.1.
- Lantang,Mayolina dkk.2013. *Analaisis Faktor Kekumuhan Permukiman Di Kelurahan Calaca Kota Manado*. Manado: Sabua Vol.5,No.1.
- Muchandanyika, Davison dan Jeremy Waiswa. 2017. Policy, Politics and Leadership in Slum Upgrading: A Comparative Analisis of Hereare and kampala.
- Nisbett, Melissa. 2017. Empowering the Empowered? Slum Tourism and The Depoliticization of Poverty. London : Geoforum 85 (2017) 37 - 45
- Nursyahbani, Raisya dan Bitta Pigawati.2015. *Kajian Karakteristik Kawsan Permukiman Kumuh Di Kampung Kota*. Semarang: Jurnal Teknik PWK Vol.4,No2.
- Nova,Luchritia Nova.2017.Peremajaan permukiman Kumuh di Kelurahan Gunung Elai, Lok Tuan, dan Guntung Kota Bontang.*Tesis*.Universitas Diponegoro.
- Olthuis,Koen Dkk. 2015. *Slum Upgrading: Assesing The Importance Of Location anda Plea For a Spatial Approach*. UNESCO: Habitat International 50 (hal 270-288)
- Pedro, Alexander Agular dan Alfredo Parelra Qualroz. 2018. Slum : Comparing Municipal and Cencus Basemaps. Saopalo : Habitat International 83 (2019)
- Pemerintah Indonesia.2017.SK Bupati Rembang No.050/0522/2017.Kabupaten Rembang: Bupati Kabupaten Rembang

Pemerintah Indonesia. 2011. Peraturan Menteri No.14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Jakarta : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pemerintah Indonesia. 2011. Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2006. Identifikasi Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan. Jakarta: Direktorat pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya-Departemen Pekerjaan Umum.

Pemerintah Indonesia. 2015. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh/2015. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Priyanto, Budi. 2016. *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh*. Yogyakarta: UGM Press

Ramdani, Bani Dipra dan Ragil Haryanto. 2013. *Preferensi Masyarakat Terhadap Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Kumuh di Kelurahan Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah*. Semarang: Jurnal Teknik PWK, Vol 2. No.3 (hal569-577).

Rindarjono, Mohammad Gamal. 2012. *Slum Kajian Permukiman Kumuh Dalam Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Media Perkasa.

Setiadi, Amos. 2012. *Identifikasi Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Bontang*. Jogjakarta: Jurnal Program Studi Arsitektur, Universitas Atma Jaya.

Syam, Muhijar.2017. Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Strategi Penangananya Pada Permukiman di Kelurahan rengas Kecamatan banggae Kabupaten Majene. *Skripsi*.Universitas Alaudin Makassar.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG